



2017

RENCANA KERJA



DINAS SOSIAL PROVINSI
KALIMANTAN UTARA



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT kami telah menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial, Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja-SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.

Dalam penulisan renja ini kami menyadari masih banyak kekurangan dan kelemahan serta masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan.

Akhirnya dengan segala keterbatasan, kami berharap Renja ini berdampak positif bagi kemajuan dan keberhasilan Provinsi Kalimantan Utara, serta pada kesempatan ini kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

Tanjung Selor, 08 Oktober 2016
Kepala Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Utara


H. Armin Mustapa, S.Pd M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19620705 198803 1 016



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG..	1
1.2 LANDASAN HUKUM	4
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN	5
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN	6
BAB III EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU,	7
BAB III TUJUAN, SASARAN,	9
BAB IV PROGRAM DAN KEGIATAN	10
BAB V PENUTUP	11
LAMPIRAN	



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Renja-SKPD memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan rancangan Renja-SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD.

Sebagai dokumen rencana tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, Renja-SKPD mempunyai arti yang strategis dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Renja SKPD merupakan dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
2. Renja merupakan acuan SKPD untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2016.



Renja SKPD merupakan salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatat dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Mengingat arti strategis dokumen Renja-SKPD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Renja SKPD harus mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah antara lain :

1. Disusun berdasarkan evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan mengacu RKPD tahun berkenaan.
2. Program dalam Renja harus sesuai dengan program prioritas sebagaimana tercantum dalam Misi RPJMD pada tahun berkenaan.
3. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD harus selaras dengan program dan kegiatan yang disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam forum Musrenbang.
4. Program dan kegiatan dalam Renja SKPD dilengkapi dengan indikator kinerja hasil (*outcome*), indikator kinerja keluaran (*output*) dan dilengkapi dengan pendanaan yang menunjukkan prakiraan maju.

Renja-SKPD mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah karena Renja-SKPD menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) kedalam rencana, program, dan penganggaran tahunan. Renja-SKPD menjembatani sinkronisasi, harmonisasi rencana strategis ke dalam langkah-langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur.



Dengan demikian Renja-SKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Cakupan dan cara penetapan tersebut, Renja-SKPD mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah dalam satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan karena merupakan komitmen pemerintah.

Proses penyusunan Renja-SKPD didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan dokumen RKPD dan Renja-SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat. Hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan Renja-SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan.

Sebagai dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja-SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan



perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja-SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan APBD.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja ini, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
5. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.



9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
11. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Utara Nomor 9 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Renja-SKPD ini adalah sebagai panduan dalam mengevaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2016 dan perencanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017.

Tujuan disusunnya Renja-SKPD adalah untuk memasukkan program/kegiatan yang ada di Rencana Kerja (RENJA) ke dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2017. Sedangkan Tujuan Penyusunan Renja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah:

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program-program prioritas.



1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN

BAB IV. PROGRAM DAN KEGIATAN

BAB V. PENUTUP



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

Secara umum kinerja pelayanan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara periode 2014-2015 **masih perlu ditingkatkan**. Data Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2013 menunjukkan angka 66,70%, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 8,59% serta Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mencapai 65,03%. Persentase jumlah pencari kerja yang ditempatkan dan jumlah pencari kerja memperoleh kesempatan kerja mengalami kenaikan selama tiga tahun terakhir. Porsi terbesar adalah dibidang pertanian dan disusul bidang jasa-jasa yang ditunjukkan dengan angka 37,76% dan 21,90%. Kemiskinan masih menjadi persoalan prioritas untuk diselesaikan di beberapa wilayah di Indoensia. Kemiskinan erat hubungannya dengan kesejahteraan hidup. Pada tahun 2010, persentase penduduk miskin Kalimantan Utara mencapai 12,47% atau setara dengan 65,9 ribu jiwa dari total penduduk. Angka ini terus mengalami penurunan hingga mencapai angka 7,73% atau 46.400 jiwa di tahun 2013. Angka kemiskinan kembali mengalami sedikit peningkatan di tahun 2014, yakni sebesar 55.800 jiwa. Tabel sebelumnya telah menjelaskan bahwa tingkat kemiskinan tertinggi ada di Kabupaten Bulungan, sedangkan yang terendah adalah Kota Tarakan (*Kalimantan Utara dalam Angka Tahun 2014*). Beberapa kerjasama bidang transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dengan Pemerintah Daerah Lainnya diantaranya Kerjasama dengan Provinsi Jawa Timur, Kerjasama dengan Provinsi Jawa Tengah, Kerjasama dengan Provinsi Jawa Barat serta Kerjasama dengan Provinsi DIY.

Belanja langsung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBDP) Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2015



sebesar Rp. 17.911.175.601 (*Tujuh belas milyar sembilan ratus sebesal juta seratus tujuh puluh lima ribu enam ratus satu rupiah*) dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.694. 558.758.,72 (*Empat milyar enam ratus sembilan puluh empat juta lima ratus lima puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh delapan tujuh puluh dua rupiah*) dan anggaran pada Panti Werdha Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 4.457.591.530. (*Empat milyar empat ratus lima puluh tujuh juta lima raus sembilan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah*), sehingga total Anggaran Dinas Sosial, Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara dan Panti Werdha adalah Rp. 27.063.325.889,72 (*Dua puluh tujuh milyar enam puluh tiga juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh sembilan tujuh puluh dua rupiah*).

Secara keseluruhan total anggaran pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara mencapai realisasi 42,87% dan fisiknya 92,58%. Total anggaran Rp 27.063.325.889,72 yang terealisasi sebesar Rp. 11.602.500.156 sehingga sisa dana Rp. 15.460.825.733,72.



BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas sSosial **maka ditetapkan** tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2017	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatkan kapasitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya	a. Meningkatnya kapasitas lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya	Persentase kegiatan yang menerapkan SOP	70%	73%	75%	78%	81%
		b. Terciptanya PNS yang kompeten	Rata-rata nilai SKP Dinsosnakertrans	60%	65%	70%	75%	80%
2	Meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan PMKS	a. Meningkatnya aksesibilitas PMKS dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase PMKS yg memperoleh bantuan sosial	40%	42%	44%	46%	48%
		b. Meningkatnya usaha kesejahteraan PMKS	Persentase kube/fakir miskin yang mendapat bantuan dan pelatihan	20%	22%	%	%	%
		c. Meningkatnya peran lembaga/masyarakat dalam menangani permasalahan sosial	Persentase PSKS yang aktif dalam penanganan permasalahan sosial	50%	55%	60%	63%	65%



BAB IV

PROGRAM DAN KEGIATAN

Memperhatikan tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan pada Bab III Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara merumuskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Tahun 2016-2021 (Lampiran 1).



BAB V

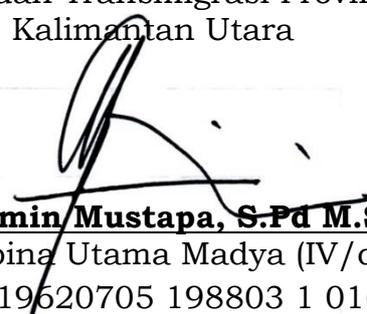
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini merupakan rencana kerja tahunan berdasarkan Renstra Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2016-2020, dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara ini sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari anggaran APBD Tahun Anggaran 2017 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Rencana Kerja Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 ini, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari visi dan misi instansi diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta berkelanjutan, dengan sesama SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara maupun dengan SKPD yang membidangi fungsi lain.

Tanjung Selor, 08 Oktober 2016
Kepala Dinas Sosial, Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Provinsi
Kalimantan Utara


H. Armin Mustapa, S.Pd M.Si

Pembina Utama Madya (IV/d)

NIP. 19620705 198803 1 016

**Rumusan Rencana Pogram dan Kegiatan SKPD Tahun 2016
dan Prakiraan Maju Tahun 2017
Provinsi Kalimantan Utara**

Jenis : OPD
Pengusul : Dinas Sosial
Sumber Dana : APBD Murni

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2016				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2017				
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
[01] Dinas Sosial												
1	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR											
1	13	SOSIAL										
1	13	01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							Tersedianya layanan administrasi perkantoran		
1	13	01	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah surat yang dikirim Materai	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	100 % 1 Tahun	13,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	13,000,000
1	13	01	02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya Air dan listrik	Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air & Listrik Jumlah pemakaian air, listrik dan internet	Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara	1 Tahun 12 Bulan	121,200,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	121,200,000
1	13	01	06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan Perizinan Kendaraan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	100 % 1 Tahun	245,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	245,000,000
1	13	01	07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Honorarium pengelola keuangan Pengelola Keuangan dan Barang	Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara	100 % 1 Tahun	811,360,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	811,360,000
1	13	01	08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jasa Kebersihan Kantor Jumlah tenaga cleaning service	Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara	0 Jasa 100 %	10,550,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	10,550,000
1	13	01	09	penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Jasa Perbaikan Peralatan Kerja Jumlah peralatan kantor	Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara	1 Jasa 100 %	26,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	26,000,000
1	13	01	10	Penyediaan alat tulis kantor	Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis ATK	Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara	1 Tahun 100 %	95,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	95,000,000

1	13	01	11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Cetak dan Penggandaan Jumlah dokumen yang dicetak/digandakan	Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara	1 Tahun 100 %	86,300,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	86,300,000
1	13	01	12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah daya yang terpasang Komponen Listrik/Penerangan	Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara	100 % 1 Tahun	15,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	15,000,000
1	13	01	13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah unit terpasang Peralatan Perlengkapan	Kalimantan Utara	100 % 1 Tahun	271,600,000	APBD Murni	Dinas Sosial	-	271,600,000
1	13	01	14	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah jenis peralatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	100 % 0 Tahun	15,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	-	15,000,000
1	13	01	15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bahan Bacaan Jumlah bahan bacaan	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	1 Tahun 100 %	38,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	-	38,000,000
1	13	01	17	Penyediaan makanan dan minuman	Durasi penyediaan makan dan minum Makan dan Minum	Tanjung Selor, Kalimantan Utara	100 % 1 Tahun	90,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	-	90,000,000
1	13	01	18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD Luar Daerah Perjalanan Luar Daerah	Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket 1 Tahun	550,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	1,122,000,000
1	13	01	19	Rapat-rapat koordinasi, pembinaan, dan pengawasan di dalam daerah	Jumlah SPPD Dalam Daerah Perjalanan Dinas Dalam Daerah	Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket 1 Tahun	475,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	950,000,000
1	13	01	20	Penyediaan pendukung penyelenggaraan pemerintahan	Jumlah pengiriman kendaraan dinas	Tanjung Selor Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket	80,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	80,000,000
1	13	02		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tersedianya Sarana dan Prasarana Aparatur							
1	13	02	11	penyewaan rumah / gedung / gudang parkir kantor dinas	Jumlah gedung/gudang kantor	Tanjung Selor, Provinsi Kalimantan Utara	1 Paket	400,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1	400,000,000
1	13	05		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase jumlah PNS yang mengikuti diklat, sosialisasi dan bimtek peraturan perundang-undangan							
1	13	05	01	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah aparatur yang mengikuti pelatihan	Dalam dan Luar Wilayah Kalimantan Utara	1 Paket	80,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1 Paket	110,000,000
1	13	15		Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	Presentase Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Lainnya (PMKS) yang terlayani							
1	13	15	06	Bantuan Keluarga Bersama (KUBE) Bagi Keluarga Miskin	Jumlah Bantuan usaha bagi keluarga miskin (KUBE)	Kalimantan Utara	1 Paket	511,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	-	0

1	13	15	10	Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT)	Jumlah Warga KAT yang mendapat pembinaan dan bantuan pembangunan perumahan	Kalimantan Utara	0 Paket	145,700,000	APBD Murni	Dinas Sosial	-	0
1	13	16		Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial								
1	13	16	07	Peningkatan kualitas pelayanan sarana dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS	Jumlah PMKS yang mendapatkan Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Pelayanan Sarpras Kessos Lansia	Kalimantan Utara	0 Paket 40 Lanjut Usia	1,096,550,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1 Paket	1,182,000,000
1	13	16	10	Penanganan masalah - masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa	Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana secara memadai	Kalimantan Utara	1 Paket	751,200,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1 Paket	816,200,000
1	13	18		Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan trauma	Persentase penyandang cacat dan trauma yang dibina							
1	13	18	06	Bantuan alat bantu bagi penyandang cacat	Jumlah Penyandang Cacat yang mendapatkan Bantuan dan pelatihan	Kalimantan Utara	0 Paket	407,590,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1 Paket	447,590,000
1	13	19		Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo								
1	13	19	02	Rehabilitasi sedang/berat bangunan panti asuhan/jompo	Rehabilitasi Panti	UPTD Panti Lansia Tresna Werna Tanjung Selor	0 Tahun	300,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1 Paket	300,000,000
1	13	21		Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase terberdayanya kelembagaan sosial							
1	13	21	01	Peningkatan Peran aktif masyarakat dan dunia usaha	Jumlah peserta pelatihan Penanganan PMKS Peran Masyarakat	Kalimantan Utara	1 Paket 0 Tahun	590,150,000	APBD Murni	Dinas Sosial	-	655,300,000
1	13	21	03	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan sosial Masyarakat	Jumlah TKSK dan PSM melaksanakan tugas secara Profesional Kualitas Pekerja Sosial Lansia	Kalimantan Utara	0 Paket 0 Orang	229,200,000	APBD Murni	Dinas Sosial	-	0
1	13	21	05	Peringatan hari kesetiakawanan sosial nasional (HKSAN) tingkat nasional	Peningkatan Kerjasama dan Koordinasi antar Aparat Pemerintah dalam Peringatan HKSAN dan Hari Pahlawan	Kalimantan Utara	1 Paket	216,050,000	APBD Murni	Dinas Sosial	-	250,850,000
1	13	21	06	Kegiatan Pembinaan Lembaga RTPC	Jumlah Petugas Lembaga RTPC yang dibina	Kalimantan Utara	1 Paket	205,000,000	APBD Murni	Dinas Sosial	1 Paket	230,000,000
				Total Anggaran OPD				Rp. 7.875.450.000,-				

TOTAL Anggaran Seluruhnya	Rp. 7.875.450.000,-				
---------------------------	------------------------	--	--	--	--